

## **IMPLEMENTASI KEUANGAN SAK ETAP PADA KUD BINA TANI KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO**

Miftah Fajar Ashari  
Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia  
Email: fajarashari02@gmail.com

### **ABSTRAK**

Salah satu sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama pada pihak diluar perusahaan adalah laporan keuangan, dimana didalamnya berisi tentang hasil dan proses pelaporan yang dapat digunakan sebagai acuan komunikasi antara data yang ada dengan kegiatan perusahaan. Dalam hal ini objek penelitian yang merupakan penyaji dalam memberikan laporan dimana harapannya pelaporannya sesuai dengan standar, dimana tujuan dalam penelitian ini yakni agar dapat objek penelitian memberikan laporan yang sesuai dengan standar SAK ETAP. Penelitian Ini Menggunakan Penelitian Kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan agar dapat menghasilkan data dan informasi adalah dengan cara tanya jawab atau berkomunikasi secara langsung dan pengambilan sampel. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa prosesakuntansi atau pelaporan yang dilakukan oleh objek penelitian belum melalukukan proses pelaporan sesuai standar (SAK ETAP).

Kata Kunci : Koperasi, Laporan Keuangan, SAK ETAP

## **IMPLEMENTATION OF SAK ETAP FINANCE AT KUD BINA TANI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO DISTRICT**

### **ABSTRACT**

*The financial statements are the main financial information to parties outside the company, which contains the accounting process that between financial data and or activities of the company. In this case, KUD Bina Tani is an entity that publishes financial statements and is expected to create that conform to the standard, ie the financial accounting standards of entities without public accountability (SAK ETAP). The purpose of this study is to know the preparation and presentation of financial statements conducted by the financial accounting standards of entities without public accountability (SAK ETAP). This research uses qualitative research. The steps taken to obtain data and information is by interview and documentation. The results in this study indicate that the financial statements compiled by KUD Bina Tani have not fully implemented (SAK ETAP) and this is due to the limited knowledge and human resources owned.*

*Keywords : Cooperatives, Financial Statements, SAK ETAP*

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik. Penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk koperasi dimana pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement ) bagi pengguna

eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat (IAI:2009).

Penyusunan laporan keuangan koperasi hendaknya berpedoman pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP terpisah dari SAK besar dimana SAK ETAP dalam pedoman penyusunan laporan keuangan dibuat lebih sederhana. Menurut Martani (2011), diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya, tetap memberikan

informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

PSAK adalah standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas, PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian tidak berlaku lagi, pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan bulan Juni 2012, PSAK No. 27 tidak tercantum. Disamping itu sesuai dengan surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Menurut Baswir (2013:21) dalam buku Koperasi Indonesia, koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan

tertentu pula. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah komponen laporan keuangan yaitu Laporan Laba/Rugi. Laba dalam suatu koperasi lebih dikenal dengan sebutan Selisih Hasil Usaha (SHU). Laporan Laba/Rugi berguna untuk mengetahui kinerja koperasi berupa pendapatan dan beban.

Badan usaha koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokrasi (Hendar 2010: 2). Pada koperasi, kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada anggota koperasi mengingat prinsip dalam koperasi adalah dari anggota,

oleh anggota dan untuk anggota (Harsoyo dkk, 2006: 102).

Koperasi Unit Desa Bina Tani merupakan salah satu koperasi besar dan merupakan koperasi yang cukup lama berdirinya. KUD Bina Tani berdiri sejak Tahun 1975 yang diprakarsai oleh Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 1975 dengan nama Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Sudah sejak kurang lebih 46 tahun berdirinya Koperasi Unit Desa ini hingga sekarang, KUD Bina Tani sudah memiliki usaha dibidang jasa diantaranya : jasa penjualan gabah, penjualan beras, penjualan benih, penjualan palawija, penjualan pupuk pestisida, jasa angkutan umum (tebu) yaitu untuk melayani anggota dan masyarakat dalam usaha angkutan dan pendistribusian hasil pertanian tebu, Simpan Pinjam, Pembayaran Rekening Listrik. Usaha yang dimiliki KUD Bina Tani ini adalah usaha yang sudah ada sejak berdirinya Koperasi tersebut. Dengan adanya usaha yang cukup banyak dan membutuhkan suatu laporan keuangan, sudah semestinya

dalam prakteknya Koperasi Unit Desa Bina Tani membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standart dan acuan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya, laporan keuangan KUD Bina Tani masih belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku sejak tahun 2011.

Berikut ini adalah salah satu penelitian terdahulu oleh Viona Yelitasari (2016) mengenai penerapan atau implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada koperasi di Bandarlampung, penelitian inilah juga yang melatar belakangi peneliti mengambil judul dalam penelitiannya ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengambil judul Analisis Implementasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada KUD BINA TANI Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sebagai acuan dalam penyelesaian penelitiannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini salah satu sumber referensi yang menjadi pendukungnya adalah penelitian terdahulu yang dimana penelitian terdahulu tersebut mengenai penerapan atau implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada koperasi di Bandarlampung oleh Viona Yelitasari, dimana dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

### **Pengertian Koperasi**

Asal mula lahirnya koperasi berasal dari abad ke-19 dimana pada saat itu sistem kapitalisme dalam dunia ekonomi meraja lela diman setiap

individunya berlomba-lomba dalam mencari keuntungan berlebih sdengan masyarakatnya tetap dalam keadaan tertindas. Dengan hal ini semua kapitalis menguasai perekonomian dalam berlebihan dengan kondisi masyarakat yang semakin terpuruk dalam penindasan yang sangat lama. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 bahwa, Didalamnya menyebutkan bahwa lembaga yang didirikan oleh beberapa orang dan beranggotakan beberapa orang dengan tujuan usaha tertentu dengan asas koperasi yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dengan berlandaskan hukum dan asas kekeluargaan.

Menurut UU No.25 Tahun 1992, koperasi adalah lembaga usaha dalam hukum yang terdiri dari beberapa orang dalam anggotanya dan memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dan anggota dalam asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah lembaga usaha dalam hukum yang dicetuskan oleh beberapa orang

anggota dengan menjadikan modal anggotanya sebagai roda dalam menjalankan usahanya demi terwujudnya kesejahteraan bersama dalam asas koperasi demi memenuhi kebutuhan bersama secara sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

### **Tujuan Koperasi**

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### **Landasan Koperasi**

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dimana menyebutkan bahwa dasar dari perekonomian Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan landasan yang menjadi dasar dari koperasi dimana pada koperasi terdapat tiga landasan koperasi yaitu :

#### 1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan ini harus dijalankan

dan diamalkan karena Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

#### 2. Landasan Operasional

Landasan operasional dalam koperasi yaitu tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Berikut ini adalah landasan operasional koperasi Indonesia yaitu :

a. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

#### 3. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain.

## **Pendirian Koperasi**

Menurut UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoprasian Bab IV, pasal 7 sampai dengan 8 rinci syarat-syarat pendirian koperasi adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.
2. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.
3. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
4. Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.

## **Koperasi Unit Desa (KUD)**

Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu

wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.

## **Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2007:2) Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut.

Menurut IAI, (2015:5) Laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

### **Pengertian SAK ETAP**

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP (IAI, 2009:1) yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

### **Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

### **Penerapan SAK ETAP Untuk Koperasi**

Dalam penerapan SAK ETAP terdapat permasalahan tentang penerapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK ETAP tidak

mengatur secara khusus terhadap laporan keuangan koperasi. Dalam buletin teknis 6 tentang penerapan SAK ETAP untuk entitas koperasi (IAI.2011:1) disebutkan dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

Dan dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP.

Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Moeloeng (2012:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

### **Jenis Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data sebagai bahan informasi untuk dijadikan alat analisis. Data kualitatif, yaitu metode penelitian ini lebih menekankan pada hal-hal positif dalam setiap hal yang terjadi dalam masalah di dalam objek penelitiannya dimana metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah secara alamiah. dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kuncinya, nantinya outputnya lebih menegaskan pada makna yang lebih generalisasi dalam penjelasannya.

## **Sumber Data**

Dalam prosesnya untuk menentukan sumber datanya tergantung pada permasalahan yang terjadi dalam objek itu sendiri.

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis datanya :

### 1. Data primer

Dimana data ini langsung memberikan informasi dalam masalah yang terjadi kepada pengumpul. Data ini biasanya didapat dengan cara wawancara dengan pihak terkait yang memiliki masalah dalam penyelesaian tugas ini. Penelitian. Dalam penelitian ini staff bagian keuangan yang paling berpengaruh atas kegiatan pengelolaan keuangannya.

### 2. Data Sekunder

Data ini biasanya didapat dengan cara menganalisa dengan metode mempelajari lebih lanjut, membaca, mencari sumber informasi dari media lainnya dan membuka kembali dokumen perusahaan yang ada. Didalam penyelesaian tugas ini data yang

kami mendapatkannya dari objek penelitian kami lakukan observasi dan Buku tentang akuntansi koperasi serta literatur dari peneliti-peneliti terdahulu.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Langkah ini adalah langkah yang paling penting dalam proses pengumpulan data dalam sebuah proses penelitian suatu masalah dalam objek, karna informasi yang paling dibutuhkan dalam proses penelitian yaitu data. Proses pengumpulannya yaitu :

### 1. Wawancara.

Proses wawancara bisa dilakukan dengan proses diskusi secara langsung pada orang yang bersangkutan dengan memberikan tanya jawab perihal masalah yang ada dalam objek penelitian tersebut, seperti halnya pemilik, para staff dan para orang-orang yang berperan dalam pelaporan keuangan dalam usaha tersebut.

### 2. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sebuah catatan di masa lalu dengan

mencari data variabel yang berbentuk laporan keuangan, kebijakan, profil dan seperti hal lainnya.

### **Analisis Data**

Analisa data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara tersistem data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan pada orang lain (Sugiyono, 2010).

### **PEMBAHASAN**

Berdirinya KUD Bina Tani Tamanan Bondowoso diprakarsai oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 pada tahun 1975 dengan nama Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Tamanan I dengan memperoleh badan hukum no. 3828/BH/II/1975. Wilayah kerjanya meliputi delapan desa yaitu : Tamanan, Kemirian, Mengen, Karang Melok, Sukosari, Wonosuko, Kalianyar, serta Sumber Kemuning.

Pemerintah memberikan tugas pada BUUD yang dalam wilayah kerjanya terdapat (BRI) Unit untuk mengadakan pembelian, pengolahan

dan penjualan gabah petani kepada Dolog dan pasaran umum. Sehingga, lapangan yang diusahakan hanya meliputi pembelian, pengolahan dan penjualan gabah petani kepada dolog saja.

Sekitar tiga tahun kemudian, muncullah Inpres No. 2 tahun 1978 dimana nama BUUD diubah menjadi KUD dan lapangan yang diusahakan ditingkatkan menjadi koperasi yang disebut koperasi serba usaha yang terkait dengan usaha-usaha para anggota/petani/masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, BUUD Tamanan I berubah menjadi KUD Bina Tani. Sedangkan lapangan yang diusahakan meliputi : pengadaan pangan, Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), Simpan Pinjam, pertokoan, *Rice Milling Unit* (RMU) dan pengadaan pupuk.

Kemudian pada tahun 1984, muncul Inpres No. 4 yang mengatakan tentang kelembagaan KUD yang menyebutkan bahwa di pedesaan hanya ada kelembagaan yang mengatur ekonomi pedesaan yaitu KUD, sehingga muncullah (BPP-

KUD) yang bertugas membimbing dan melindungi keberadaan KUD.

Dengan keikutsertaan pemerintahan pada orde baru dan seiring dengan era reformasi maka keluarlah Inpres No. 18 tahun 1998 sebagai pengganti Inpres No. 4 tahun 1984 yang menyebutkan bahwa di pedesaan tidak hanya KUD yang boleh didirikan tetapi juga koperasi lain sehingga bebas bersaing.

### **Penerapan SAK ETAP Untuk Koperasi**

Dalam penerapan SAK ETAP terdapat permasalahan tentang penerapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK ETAP tidak mengatur secara khusus terhadap laporan keuangan koperasi. Dalam buletin teknis 6 tentang penerapan SAK ETAP untuk entitas koperasi (IAI.2011:1) disebutkan dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum

(*general purpose financial statement*).

Dan dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27.

1. Neraca

<b>AKTIVA</b>		<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	
<b>AKTIVA LANCAR</b>	Rp.	<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	Rp.
Kas Setara kas	Rp xxx	Hutang Usaha	Rp xxx
Piutang Usaha	Rp xxx	Hutang lain - lain	Rp xxx
Piutang Lain - lain	Rp xxx	Hutang Pajak	Rp xxx
Persediaan	Rp xxx		
Pajak Dibayar dimuka	Rp xxx		
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>Rp xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>		<b>EKUITAS</b>	
Harga Perolehan	Rp xxx	Modal	Rp xxx
Akumulasi Penyusutan	Rp (xxx)	Laba/(Rugi) berjalan	Rp (xxx)
<b>Aktiva Tetap Bersih</b>	<b>Rp xxx</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>Rp xxx</b>	<b>Total Kewajiban Dan Ekuitas</b>	<b>Rp xxx</b>

2. Laporan Laba / Rugi (SHU)

Penjualan	Rp xxx	Rp (xxx)
HPP	Rp xxx	
Laba (rugi) kotor		
<b>Beban administrasi :</b>		
Beban utilitas	Rp xxx	
Beban Penyusutan	Rp xxx	
Beban pemeliharaan	Rp xxx	
Beban pajak	Rp xxx	
<b>Total beban Administrasi</b>	<b>Rp xxx</b>	

<b>Beban penjualan :</b>			
Beban gaji	Rp xxx		
Beban iklan	Rp xxx		
Beban pengiriman	Rp xxx		
<b>Total beban penjualan</b>	<b>Rp xxx</b>		
<b>Total beban</b>		<b>Rp xxx</b>	
<b>Laba operasi</b>		<b>Rp xxx</b>	
Pendapatan lain	Rp xxx		
		<b>Rp xxx</b>	
Beban lain-lain	Rp xxx		
Laba bersih sebelum pajak		Rp	xxx
Beban pajak penghasilan		Rp	xxx
<b>Laba (rugi) bersih</b>		Rp	xxx

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Modal awal		Rp	xxx
Penambahan :			
Saldo laba (rugi) ditahan	Rp	xxx	
<b>Total penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>xxx</b>
Pengurangan :			
Prive	Rp	xxx	
Saldo laba (rugi) berjalan	R	xxx	
Rugi bersih Desember 2015	Rp	xxx	
Total pengurangan		Rp	xxx
<b>Modal akhir 31 Desember 2015</b>		<b>Rp</b>	<b>xxx</b>

4. Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktifitas Operasi			
Rugi Bersih			Rp (xxx)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas bersih yang disediakan oleh aktifitas operasi			
Beban Penyusutan	Rp	xxx	
Penurunan Piutang Usaha	Rp	xxx	
(Kenaikan) Persediaan	Rp	xxx	Rp xxx
<b>Kas bersih yang disediakan oleh aktifitas operasi</b>			<b>Rp xxx</b>
Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan			
Prive	Rp	xxx	
Kas bersih yang disediakan oleh aktifitas pendanaan			Rp xxx
<b>Kenaikan (penurunan) kas bersih</b>			<b>Rp xxx</b>
Kas pada awal tahun			Rp xxx
Kas pada akhir tahun			Rp xxx

5. Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan daerah kerjanya, Catatan atas laporan keuangan KUD Bina Tani Bondowoso Tamanan koperasi harus merupakan koperasi primer, yaitu memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi dan lainnya. Sedangkan ditinjau dari fungsi dan lapangan yang diusahakan, KUD tersebut adalah unit serba usaha, yaitu unit usaha yang melakukan aktivitas

usaha dengan melihat kepentingan dan tujuan dari keanggotannya tersebut.

Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil perbandingan :

1. Neraca

Laporan Neraca koperasi bina tani dalam analisa yang kami lakukan menghasilkan informasi bahwa penyusunannya sudah dapat dikatakan sesuai dengan SAK ETAP.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi koperasi bina tani sudah cocok dengan standar SAK ETAP, dimana objek peneliti dalam proses penyusunannya telah melakukan dengan baik dimana antara beban akun dan pendapatan ada pembebedaan dan juga telah dijelaskan fungsi dan dan sifat-sifat akunnya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Dimana pada laporan perubahan ekuitas objek penelitian atau koperasi telah melakukan proses penyusunan yang telah sesuai dengan SAK ETAP, dengan

melakukan pemisahan antara akhir tahun dan awal tahun.

4. Laporan Arus Kas

Koperasi bina tani belum membuat pelaporan ini, dikarenakan kepemimpinan periode sekarang tidak mengetahui standar pelaporan keuangan yang digunakan KUD Bina Tani.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

KUD Bina Tani belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan, dikarenakan kepemimpinan periode sekarang tidak mengetahui standar proses pelaporan keuangan yang digunakan KUD Bina Tani.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil analisa pembahasan penelitian dan analisa pada laporan keuangan koperasi bina tani didapatkan beberapa kesimpulan antara lain :

Didalam prosesnya penyusunan pelaporan keuangan koperasi unit desa bina tani hanya sebatas menyajikan laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan

sisanya hasil usaha, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan yang telah objek peneliti lakukan seperti halnya neraca, laporan rugi laba, laporan sisa hasil usaha dan laporan perubahan ekuitas merupakan pelaporan yang sudah sesuai dengan SAK ETAP. Hanya saja koperasi belum melakukan pelaporan tentang laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan pada pelaporannya, berdasarkan analisa yang telah dilakukan kendala utamanya adalah dalam pelaporan ini kurangnya nilai kesadaran SDM terhadap pentingnya SAK ETAP terhadap keberlangsungan usaha koperasi kedepannya.

Dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran dari peneliti khususnya untuk Koperasi Bina Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso antara lain :

1. Melakukan proses implementasi prosedur keuangan SAK ETAP sebagai pedoman dalam proses pengakuntasian suatu pelaporan keuangan usaha koperasi kedepannya.
2. Proses pelaporan keuangan koperasi alangkah lebih baik apabila melaporkan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, karna pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan penjelasan tentang prosedur penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
3. Untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya apabila proses penelitian sama, diharapkan agar objek penelitian berikutnya dapat melakukan pengimplementasian standar keuangan SAK ETAP dengan sebaik-baiknya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adriani Lilya Anantawikrama, Tungga Atmadja & Ni Kadek Sunarwati. 2012. **Proses Penyusunan Catatan Keuanagn Dengan Sak Etap Pada Usaha Micro**

- Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Study Interpretatif pada peggy Salon).** Jurnal. Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim
- Baswir, Revisand. 2013. **Koperasi Indonesia.** Edisi 2. Yogyakarta: FEB UGM.
- Harsoyo, Y., dkk. 2006. **Menatap masa depan ideologi koperasi.** Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Widayatama.
- Hendar. 2010. **Manajemen Perusahaan Koperasi.** Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. **SAK ETAP.** Jakarta.
- IAI. 2009. **Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.** Dewan standar akuntansi keuangan, Jakarta.
- Martin, Jim. 2009. **Accounting For Expenses.** The CPA Journal.
- Moleong, L. J. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif.** Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munawir. 2007. **Analisis pelaporan keuangan.** Yogyakarta : Edisi Empat, Liberty.
- Martani, Dwi. 2011. **Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP).** <http://staff.blog.ui.ac.id>
- Narsa, Niluh Putu Dian RH dan Isnalita, 2011. **Keterapan SAK ETAP serta persepsi pelaku koperasi dan akuntan pendidik.** Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim dan jurnal akuntansi universitas Udayana.
- Rahardja, Prathama. Manurung, Mandala. 2006. **Teror ekonomi mikro suatu pengantar,** Edisi

- Ketiga, Jakarta; diterbitkan oleh fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Susilo dan Gudnanto. 2011. **Pemahaman Individu Teknik Non Tes**. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Republik Indonesia. 1992. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian**. Jakarta, Sekretariat Negara.
- Rudianto, 2010. **Akuntansi koperasi, konsep dan proses penyusunan laporan keuangan**, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Salprida. 2010. **Akuntansi berbasis SAK ETAP pada koperasi petani karet Karya Harapan (Koptan-Kkh) Rohankulu**. Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Schipper, Khaterine A., Chaterine M. Schrand, Terry Shevlin & T. Jeffrey Wilks. 2009. **Reconsidering Revenue Recognition**. Journal Accounting Horizons.
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Bisnis**. Afabeta, Bandung.
- Viona Yulitasari. 2016. **Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Koperasi di Bandarlampung**. Skripsi. Universitas Lampung.
- Walgito, Bimo. 2010. **Pengantar psikologi umum**. Yogyakarta : Penerbit Andi.